

**PENGELOLAAN WAKAF TUNAI UNTUK PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN UMAT ISLAM DI NEGARA ASEAN**

**(Studi Perbandingan Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Hukum Islam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum  
pada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

**RAHMAWATI**  
**NIM: 10400112023**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2016**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmawati  
NIM : 10400112023  
Tempat/tgl.Lahir : Boronginru, 07 Agustus 1995  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Boronginru, Desa Parang Baddo, Kecamatan Polong  
Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar  
Judul : Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Peningkatan Kesejahteraan  
Umat Islam di Negara ASEAN (Studi Perbandingan Negara  
Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 Agustus 2016

Penyusun

**Rahmawati**

**NIM: 10400112023**

## PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pengelolaan Wakaf Tunai untuk Peningkatan Kesejahteraan Umat Islam di Negara ASEAN (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam)", yang disusun oleh Rahmawati, NIM: 10400112023, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 M, bertepatan dengan 28 Dzulkaidah 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sidang Munaqasyah (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 31 Agustus 2016 M.  
28 Dzulkaidah 1437 H.

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Abdillah Mustari, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Abd. Rahman Qayyum, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Azman, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Irfan, S.Ag., M.Ag	(.....)

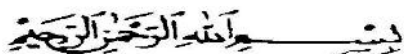
Diketahui oleh:

Dekan fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP: 19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

حمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين , وعلى اله  
وصحبه اجمعين. اما بعد

Segala puji kehadiran Allah SWT dengan Rahmat dan Magfirah-Nya serta salawat serta salam teruntuk Nabi sepanjang zaman, Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang. Atas Ridha-Nya dan doa yang disertai dengan usaha yang semaksimal setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana, tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat di bangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul **“Pengelolaan Wakaf Tunai untuk Peningkatan Kesejahteraan Umat Islam di Negara ASEAN (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam)”**. Semoga kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi semua pihak, baik dalam bentuk motivasi moril maupun materil. Karena itu, kemudian penulis berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya kepada kedua orang tua peneliti yang selalu mendoakan Ayahanda **Jufri** dan Ibunda **Mawati**. Keduanya yang sampai saat ini masih berada disampingku dengan susah dan jerih payahnya mengasuh dan mendidik serta memberikan materi yang tak henti-

hentinya. Dan kepada Kakek dan Nenek tersayang, yang sudah merawat selagi saya masih kecil dan kasih sayang yang luar biasa dari beliau. Adik tercinta **Rahmatullah** yang selalu memberikan semangat. Seluruh keluarga besar tercinta yang selalu memberikan motivasi, bantuan moril dan materil serta do'a restu sejak awal melaksanakan studi sampai selesai.

Secara berturut-turut penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si.**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Serta para wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
2. **Prof. Dr. Darussalam Syamsudin, M.Ag.**, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Serta para wakil dekan beserta seluruh stafnya.
3. **Dr. Abdillah Mustari, M.Ag.** selaku ketua dan **Dr. Achmad Musyahid, M.Ag.** selaku sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum serta stafnya atas izin pelayanan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. **Dr. Azman, M.Ag.** selaku Pembimbing I dan **Irfan, S.Ag., M.Ag.** selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
5. **Dr. H. Abd Halim Talli, M.Ag** selaku penguji I dan **Dr. H . Abd. Rahman Qayyum, M.Ag** selaku penguji II yang telah banyak memberikan masukan-masukan kepada penulis.
6. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu dan pelayanan yang berguna.

7. Terima kasih kepada teman-teman penghuni Pondok Alternatif Putri yang selalu ada saat suka maupun duka dan tiada hentinya memberikan motivasi. selama kuliah hingga saat sekarang ini.
8. Seluruh Teman-teman mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Angkatan 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang setia membantu dari awal kuliah hingga sekarang.
9. Terima Kasih kepada semua teman- teman KKN Reguler UINAM Angkatan ke 51 Desa Betao, Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidendeng Rappang yang senantiasa memberi dukungan dan semangat yang tiada henti-hentinya.
10. Terima kasih kepada semua teman-teman alumni SMA N. 1 Bontonompo angkatan 2009 yang turut mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

*Akhirul kalam*, disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat beberapa ketidak sempurnaan sebagaimana idealnya suatu karya ilmiah. Oleh karena sumbangsih kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak merupakan penghargaan dan kehormatan bagi peneliti. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi peneliti sendiri.

***Wassalam***

Makassar, 22-Juli-2016

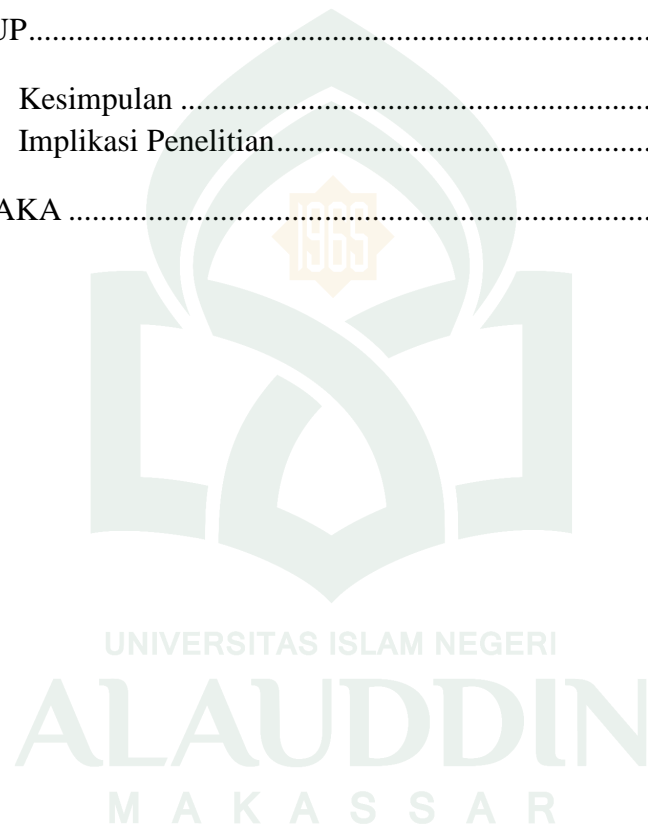
Peneliti,

**Rahmawati**  
**NIM: 10400112023**

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1-15
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Tujuan dan Kegunaan .....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF TUNAI .....	16-35
A. Pengertian Wakaf Tunai.....	16
B. Rukun dan Syarat Wakaf Tunai .....	21
C. Sejarah Wakaf Tunai.....	26
D. Tujuan dan Manfaat Wakaf Tunai .....	29
E. Dasar Hukum Wakaf Tunai .....	31
BAB III WAKAF TUNAI DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK ..	36-44
A. Wakaf Tunai Ditinjau dari Pandangan Ulama .....	36
B. Wakaf Tunai Menurut Fatwa MUI .....	38
C. Wakaf Tunai Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.....	40

BAB	IV PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI NEGARA INDONESIA, MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT ISLAM.....	45-54
	A. Pengelolaan Wakaf Tunai di Negara Indonesia .....	45
	B. Pengelolaan Wakaf Tunai di Negara Malaysia.....	50
	C. Pengelolaan Wakaf Tunai di Negara Brunei Darussalam.....	52
BAB V	PENUTUP.....	55-56
	A. Kesimpulan .....	55
	B. Implikasi Penelitian.....	56
DAFTAR PUSTAKA .....		57-60





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal		zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik dibawah)
ض	ad		de (dengan titik dibawah)
ط	a		te (dengan titik dibawah)

ظ	a		zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain		apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fat ah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	ammah	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	fat ah dan y	ai	a dan i
اَوَ	fat ah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَيَ... / اِ....	Fat ah dan alif atau y		a dan garis di atas
ي	Kasrah dan y		i dan garis di atas
و	ammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh:

: m ta

: ram

قيل : q la

يموت : yam tu

#### 4. *T marb ah*

Transliterasi untuk *t ' marb ah* ada dua yaitu: *t ' marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah, kasrah, dan ammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *t ' marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marb ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: rau ah al-a f l

المدينة الفا ضلة : al-mad nah al-f ilah

: rau ah al-a f l

#### 5. *Syaddah (Tasyd d)*

Syaddah atau tasyd d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyd d ( ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

: rabban

نجينا : najjain

: al- aqq

: nu”ima

: ‘duwwun

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi .

Contoh:

: ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

: ‘Arab (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## **6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ).

Contoh :

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalزال (az-zalزال)

: al-falsafah

: al- bil du

## 7. *Hamzah.*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

: ta'mur na

: al-nau'

: syai'un

: umirtu

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur' n), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

F il l al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadw n

## 9. *Laf al-jal lah ( )*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله d null h bill h

Adapun *t ’ marb ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laf al-jal lah*, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:

في رحمة الله hum f ra matill h

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

Inna awwala baitin wu i’a linn si lalla bi bakkata mub rakan

Syahru Rama n al-la unzila fih al-Qur’ n

Na r al-D n al- s

Ab Na r al-Far b

Al-Gaz l

Al-Munqi min al- al l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Ab al-Wal d Mu ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,  
Ab al-Wal d Mu ammad (bukan: Rusyd, Ab al-Wal d Mu ammad Ibnu)

Na r mid Ab Za d, ditulis menjadi: Ab Za d, Na r mid (bukan:  
Za d, Na r mid Ab ).

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. : sub nah wa ta' l

saw. : allall hu 'alaihi wa sallam

a.s. : 'alaihi al-sal m

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. : Wafat tahun

QS.../...: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS li 'Imr n/3: 4

HR : Hadis Riwayat



## ABSTRAK

**NAMA : Rahmawati**  
**NIM : 10400112023**  
**JUDUL : Pengelolaan Wakaf Tunai untuk Peningkatan Kesejahteraan Umat Islam di Negara Asean (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam)**

---

Pokok permasalahan penelitian adalah, Bagaimana Pengelolaan Wakaf Tunai untuk Peningkatan Kesejahteraan Umat Islam di Negara ASEAN (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam), Dalam Pokok masalah tersebut selanjutnya akan dirumuskan dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana hakikat wakaf tunai ?, 2) Bagaimana wakaf tunai ditinjau dari Fikih, fatwa MUI dan Undang-undang?, 3) Bagaimana manfaat wakaf tunai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam?.

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan syar'i, yuridis dan sosiologis. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan. Teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian yaitu penelitian perpustakaan (*library research*). Data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, media internet dan lain-lain. baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. 1) wakaf tunai adalah wakaf yang dikeluarkan oleh wakif berupa uang tunai untuk dimanfaatkan dan diserahkan kepada pihak pengelola tanpa mengurangi atau menghabisi nilai wakaf tersebut. 2) Menurut Ulama Fikih bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya berkisar pada wujud uang, karena uang banyak beredar dimasyarakat sementara fungsinya dilihat dari satu sisi hanya sebagai alat tukar menukar dan dilihat dari sisi lain sebagai standar nilai. Sedangkan menurut Fatwa MUI wakaf tunai merupakan wakaf yang dilakukan seseorang atau lembaga ataupun badan hukum dalam bentuk uang. Wakaf uang hukumnya boleh, dimana nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 16 ayat 3 bagian (a) dijelaskan bahwa benda bergerak yang bisa diwakafkan adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi (a) uang. 3) Manfaat wakaf tunai dalam mensejahterakan umat Islam di Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam adalah dalam aspek sosial-ekonomi, aspek kesehatan seperti pembangunan klinik dan rumah sakit, dan aspek pendidikan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Bagi kehidupan manusia di dunia, salah satu aspek terpenting adalah kehartabendaan, dimana harta merupakan segala yang dimiliki seorang manusia, mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan olehnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk didalamnya adalah uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Harta dalam pandangan hukum Islam memiliki posisi yang penting sebagai pendukung ibadah manusia kepada Allah swt. Sebagaimana diketahui bahwa ibadah dalam Islam ada yang berupa ibadah *badaniyah* seperti shalat dan puasa, dan ibadah *mal* (harta) seperti zakat, infaq dan wakaf.

Dalam ajaran agama Islam, persoalan pengelolaan harta mendapat penegasan dan perhatian serius, tujuan utama anjuran agama terhadap sistem pengelolaan harta adalah untuk kemaslahatan bersama guna menjaga keseimbangan dalam tatanan kehidupan sosial yang berkelanjutan. Keseimbangan sosial tidak akan tercapai tanpa diiringi upaya kreatif dalam pola desentralisasi distribusi kekuasaan dan kekayaan. Pentingnya kepedulian sosial dalam Islam ditunjukkan oleh indikasi bahwa seluruh aplikasi pranata pilar agama (rukun Islam) bermuara kepada kepentingan sosial, serta memberikan garis demarkasi yang tegas terhadap penyalahgunaan harta yang merugikan kehidupan baik pribadi atau sosial.<sup>1</sup> Dalam regulasi pranata hukum Islam, pendayagunaan harta diatur sedemikian rupa dengan berbagai kategorinya yang secara koheren membangun sistem jaringan ekonomi praktis dalam mekanisme kehidupan sosial.

---

<sup>1</sup>Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011) h. 28.

Artikulasi terpenting dari berbagai postulat pemberdayaan harta dalam Islam adalah bertujuan pada kepentingan umum yang bersifat langgeng. Kategori pengelolaan harta yang berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat langgeng ini disebut dengan wakaf.

Wakaf disebut dengan sedekah jariyah (*shadaqah jariyah*), wakaf dianggap sebagai bagian dari sedekah. Secara umum, sedekah dapat dibedakan menjadi dua, sedekah yang wajib dan sedekah yang sunah. Sedekah yang sunah pun dapat dibedakan menjadi dua pula, sedekah yang pahalanya tidak senantiasa mengalir, dan sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun pihak yang menyedekahkan hartanya telah meninggal dunia. Sedekah yang terakhir disebut wakaf, para ulama menafsirkan *sadaqah jariyah* sama dengan wakaf.<sup>2</sup>

Secara universal wakaf telah diaplikasikan oleh umat manusia sepanjang sejarah. Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi kemajuan sebuah peradaban umat manusia adalah berupa peninggalan fisik sebagai bukti kemajuan dalam segala aspek kehidupan. Dengan kata lain, harta menempati fungsi sentral dalam setiap bentuk peninggalan peradaban umat manusia. Dari peninggalan tersebut dapat diketahui perkembangan sistem ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi harta. Namun demikian, keberagaman sistem yang dibangun berujung pada tujuan yang sama, yaitu demi kemakmuran sebagai cermin utama kemajuan sebuah peradaban.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Mukhtar Lutfi, *Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 6.

<sup>3</sup>Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, h. 25.

Diantara ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan wakaf ialah QS li 'Imr n/3: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya:

kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.<sup>4</sup>

Ayat ini merupakan salah satu motivasi terhadap penyempurnaan ibadah kepada tuhan sehingga dikatakan-Nya bahwa apabila kamu belum menafkahkan sebahagian dari harta yang kamu cintai, maka nilai ibadahmu belum sempurna. Membelanjakan harta itu pada hakekatnya adalah merupakan realisasi dari suatu hal menyangkut perbuatan kebajikan, dimana kebajikan itu menjadi salah satu tujuan yang penting dari ajaran Islam, bahwa pada hakikatnya bakti kepada masyarakat serta menyantuni umat Islam ada dua tujuan yang dapat dicapai dengan wakaf agar memperoleh keridhaan Allah swt. Dan memberikan pengayoman sosial.<sup>5</sup>

Dikalangan umat Islam, wakaf yang sangat populer adalah masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pendidikan serta belakangan baru ada wakaf untuk yang berbentuk tunai (*cash*) atau wakaf benda bergerak yang manfaatnya untuk kepentingan pendidikan, riset, rumah sakit, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain.<sup>6</sup>

Akhir-akhir ini sedang dilakukan sosialisasi wakaf produktif dan wakaf tunai atau wakaf uang. Selanjutnya para ulama mempersoalkan apakah uang dapat

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet, I; Bandung: 2012), h. 62.

<sup>5</sup>Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, h. 67.

<sup>6</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: kementerian Agama RI, 2007), h. 8.

diwakafkan, mengingat sifatnya yang tidak tetap dan musnah ketika digunakan. Sebagian mereka membolehkan wakaf uang dan sebagian lagi tidak membolehkan. Persoalan ini timbul karena uang banyak beredar di masyarakat sementara fungsinya dilihat dari satu sisi hanya sebagai alat tukar menukar dan dilihat dari sisi lain sebagai standar nilai, tetapi apabila difungsikan sebagai standar nilai yang relatif dapat dipertahankan tentu memenuhi persyaratan wakaf, karena uang dalam fungsinya yang terakhir dapat disimpan, dipinjamkan dan dijual belikan.<sup>7</sup>

Wakaf uang sebenarnya sudah dikenal oleh para ulama klasik. Ulama yang membolehkan wakaf uang berpendapat, bahwa uang dapat diwakafkan asalkan uang tersebut diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang itu.<sup>8</sup>

Wakaf tunai atau wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar, akan tetapi lebih dari itu merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi yang dapat diwujudkan. Misalnya, memberlakukan sertifikat model ini keuntungan wakif dapat secara fleksibel

---

<sup>7</sup>H. Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat: Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor* (Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), h. 202.

<sup>8</sup>Mukhtar Lutfi, *Manajemen Wakaf: Upaya progresif dan Inovatif bagi kesejahteraan umat*, h. 115.

mengalokasikan hartanya dalam bentuk wakaf, wakif tidak memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif. Juga, wakaf seperti ini dapat diberikan dalam satuan yang lebih kecil.<sup>9</sup>

Nazir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf agar pengurusan harta wakaf tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka perlu perencanaan pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam perencanaan perlu dilakukan identifikasi masalah dan kebutuhan, penetapan prioritas, identifikasi potensi yang dimiliki, penyusunan rencana kegiatan yang akan dicapai oleh seorang pengelola wakaf (nazir).

Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf tunai adalah model dana abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar, diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjamin Syariah. Keamanan investasi ini paling tidak mencakup dua aspek. Aspek *pertama*, yaitu keamanan nilai pokok dana pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan). Aspek *kedua*, yaitu investasi dana abadi tersebut harus produktif, yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan (*incoming generation allocation*) karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan organisasi akan dilakukan dan sekaligus menjadi sumber utama untuk pembiayaan.<sup>10</sup>

Wakaf merupakan satu instrumen ekonomi Islam yang belum diberdayakan secara optimal di Indonesia. Padahal di sejumlah negara lain seperti

---

<sup>9</sup>Mukhtar Lutfi, *Manajemen Wakaf: Upaya progresif dan Inovatif bagi kesejahteraan umat*, h. 145.

<sup>10</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, h. 9.

Mesir dan Bangladesh, wakaf telah dikembangkan sedemikian rupa, sehingga menjadi sumber pendanaan yang tiada habis-habisnya bagi pengembangan ekonomi umat. Dalam kondisi keterpurukan ekonomi seperti yang tengah dialami Indonesia saat ini, alangkah baiknya bila kita mempertimbangkan pengembangan instrumen wakaf.<sup>11</sup>

Di Indonesia praktik wakaf tunai baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia Pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf Uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah/11 Mei 2002 guna menjawab surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.<sup>12</sup>

Pada wakaf tanah, yang dapat menikmati harta wakaf tanah dan bangunan adalah rakyat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara rakyat miskin sudah sangat tersebar luas diseluruh penjuru dunia, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah para *wakif* tersebut, timbullah pemikiran pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.

Fatwa majelis Ulama Indonesia dikemukakan yang dimaksud wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang tersebut

---

<sup>11</sup>Rahmawati Muin, *Lembaga keuangan Syariah Bank dan Non Bank* (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 155.

<sup>12</sup>Rachmadi Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 106.

adalah surat-surat berharga. Selain itu, dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002, bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.

Negara Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai potensi untuk menjadi negara maju dengan membangun, mewujudkan dan mengukuhkan institusi wakaf. Pelaksanaan wakaf di negara ini tidak jauh berbeda dibanding dengan negara-negara muslim yang lain seperti mesir, Kuwait, Turki dan Maroko. Di negara-negara Afrika dan Asia Barat seperti Mesir Kuwait dan Maroko telah diwujudkan Kementerian wakaf untuk mengolah harta-harta wakaf. Dari dana-dana wakaf berbagai aktifitas keislaman dilaksanakan secara berencana.

Negara Brunei Darussalam menyerahkan segala urusan mengenai wakaf kepada Majlis Ugama Islam yaitu berdasarkan peruntukan undang-undang yang tercantum dalam undang-undang negara Brunei Darussalam yaitu akta Majelis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 dalam Bab 98 dan 100.

Dalam rangka pembangunan umat, wakaf tunai dianggap salah satu aset penting yang dapat diharapkan di Negara-negara asean, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka masalah pokok pembahasan yaitu, Bagaimana Proses Pengelolaan Wakaf Tunai untuk



Peningkatan Kesejahteraan umat di Negara ASEAN (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam)?.

Agar pembahasan skripsi ini terfokus pada permasalahan maka penulis merumuskan beberapa masalah yang perlu mendapat pembahasan dan pemecahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana hakikat wakaf tunai?
2. Bagaimana wakaf tunai ditinjau dari fatwa MUI, fikih dan Undang-Undang?
3. Bagaimana manfaat wakaf tunai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam?

### ***C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

Definisi Operasional Variabel dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang variabel-variabel yang diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalah-pahaman. Adapun judul dalam penelitian ini adalah “Pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat Islam Di negara ASEAN (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam)”. Definisi operasional di jelaskan sebagai berikut:

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>13</sup>

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan, meningkatkan.

---

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet, I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 889.

Sejahtera adalah Aman, sentosa dan makmur; selamat dan terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran. Sedangkan kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup); kemakmuran.<sup>14</sup>

Umat adalah para penganut suatu agama<sup>15</sup>, jadi Umat Islam adalah Para penganut agama Islam.

Negara ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara (Perbara) atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nation, merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967.<sup>16</sup> Sedangkan studi perbandingan yang dimaksud penulis adalah membandingkan atau mempelajari wakaf tunai di negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Dengan demikian dari definisi operasional variabel di atas maka yang dimaksud dengan Pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat Islam Di negara berkembang (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam) adalah Pengawasan dalam pelaksanaan yang terlibat dalam wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, atau lembaga dan badan hukum dalam bentuk uang tunai dalam proses meningkatkan kemakmuran para penganut agama Islam di Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam yaitu negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap proses pengelolaan wakaf tunai di Negara berkembang. Yaitu bagaimana tata cara

---

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1051.

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1242.

<sup>16</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Negaraberkembang> (1 Juni 2016).

pengelolaan wakaf tunai di Negara berkembang terkhusus pada negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam agar dapat mencapai hasil yang maksimal serta dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

#### **D. Kajian Pustaka**

Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan dengan draft skripsi ini, maka penulis akan mengambil beberapa buku yang menjadi rujukan utama sebagai bahan perbandingan.

H. Mukhlisin Muzarie, dimana didalam bukunya *terdapat penjelasan mengenai hukum perwakafan dan implikasinya terhadap masyarakat*. Buku ini membahas tentang undang-undang Nomor 41 tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang persyaratan nadzir perorangan.

Mukhtar Lutfi dalam bukunya yang berjudul *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf* buku ini membahas perwakafan di Indonesia dan peranan wakaf di negara-negara muslim.

Buku *Strategi pengembangan wakaf tunai* yang diterbitkan oleh Direktorat pemberdayaan wakaf, buku ini membahas tentang periodisasi pengelolaan dan sosialisasi wakaf tunai, strategi pengelolaan dana wakaf, pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf tunai dan pelaksanaan proyek percontohan wakaf tunai.

Dengan demikian berdasarkan kajian pustaka diatas, tidak ditemukan persamaan judul dengan proses pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan hidup umat Islam di Negara ASEAN (studi perbandingan Negara Asean), juga tidak ditemukan hasil penelitian yang serupa dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

### **E. Metode Penelitian**

Untuk mencapai hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode ini merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target karena salah satu metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu hasil yang memuaskan. Di samping itu metode merupakan bertindak terhadap sesuatu dari hasil yang maksimal.<sup>17</sup> Adapun dalam skripsi ini nanti peneliti akan menggunakan metode sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data yang menggunakan analisis, proses dan makna lebih ditonjolkan. Dengan metode penelitian kajian pustaka (*library research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.<sup>18</sup> Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut diatas.

Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang perbandingan pengelolaan wakaf tunai di Negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat Islam di Negara berkembang.

---

<sup>17</sup>Anton Bakker, *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 10.

<sup>18</sup>Masyuri, dkk., *Metodologi Penelitian* (Bandung: Rafika Aditama, 2008), h. 50.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam menemukan jawaban, maka peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

### a. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan beberapa data yang memuat tinjauan hukum, terkait dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>19</sup>

### b. Pendekatan Syari'i

Pendekatan Syari'i adalah pendekatan hukum (syari'i), yakni menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan wakaf dalam al-Qur'an dan Fatwa Ulama.

### c. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat. Peneliti menggunakan logika-logika dan teori sosiologi baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.<sup>20</sup>

## 3. Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang

---

<sup>19</sup>Abd. Kadir Ahmad, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data*, Makalah yang disajikan pada Pelatihan Penelitian di UIN Alauddin (Makassar: t.p., 2012) h. 8.

<sup>20</sup>U. Maman, *Metode Penelitian Agama: Teori dan Praktik*, Edisi I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 127-128.

diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.<sup>21</sup>

a. Sumber Primer

Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>22</sup> Misalnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

b. Sumber Sekunder

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen.<sup>23</sup> Misalnya buku masalah hukum perwakafan di Indonesia, pemberdayaan wakaf produktif (konsep, kebijakan dan implementasi), internet, dan buku yang terkait dengan Wakaf tunai.

4. Metode Penulisan Data

Dalam metode pengumpulan data nanti teknik yang akan digunakan yaitu:

- a. Kutipan Langsung, Yaitu peneliti mengutip pendapat atau tulisan orang secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa berubah. Contohnya Fatwa majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan yang dimaksud wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga. Selain itu, dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002, bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat

---

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) h. 129.

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta. 2006), h. 253.

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, h. 254.

dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.

- b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan dalam susunan redaksi yang baru. Misalnya Dalam regulasi pranata hukum Islam pendayagunaan harta diatur sedemikian rupa dengan berbagai kategorinya, yang secara koheren membangun system jaringan ekonomi praktis dalam mekanisme kehidupan sosial. Artikulasi terpenting dari berbagai postulat pemberdayaan harta dalam Islam adalah bertujuan pada kepentingan umum yang bersifat langgeng. Kategori pengelolaan harta yang berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat langgeng ini disebut dengan wakaf.

Adapun tehnik pengolahan data yang akan digunakan yaitu:

- 1) Metode Komparatif yaitu, digunakan untuk membandingkan antara beberapa data.
- 2) Metode Induktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- 3) Metode Deduktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Abd. Kadir Ahmad, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data*, Makalah yang disajikan pada Pelatihan Penelitian di UIN Alauddin, h. 8.

## ***F. Tujuan dan Kegunaan***

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hakikat wakaf tunai di negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam
- b. Untuk mengetahui dampak wakaf tunai bagi masyarakat Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam
- c. Untuk mengetahui perbedaan pengelolaan wakaf tunai di Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.

### **2. Kegunaan**

#### **a. Kegunaan teoritis**

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan wakaf tunai, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan lebih dalam lagi mengenai berbagai permasalahan pengoptimalan wakaf tunai di negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.

#### **b. Kegunaan praktis**

1. Dapat memberikan pengetahuan tentang wakaf tunai
2. Agar dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang proses pengelolaan wakaf tunai yang lebih produktif
3. Agar masyarakat dapat meningkatkan pengelolaan wakaf tunai.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF TUNAI

#### A. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf menurut Bahasa Arab berarti “*al-habsu*”, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “*habbasa*” dan berarti mewakafkan harta karena Allah.<sup>1</sup>

Perkataan wakaf yang menjadi Bahasa Indonesia, berasal dari Bahasa Arab dalam bentuk *masdar* atau kata jadian dari kata kerja atau *fi'il waqafa*. Kata kerja atau *fi'il waqafa* ini ada kalanya memerlukan objek (*muta'addi*) dan adakalanya memerlukan objek (*lazim*). Dalam perpustakaan sering ditemui sinonim *waqf* ialah *habs Waqafa* dan *habasa* dalam bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan menahan atau berhenti di tempat.<sup>2</sup>

Secara filosofis, berhenti berarti awal dan akhir dari gerak atau sumber dan terminal dari seluruh aktifitas apapun. Dalam deretan angka, berhenti identik dengan angka nol yang bukan berarti tidak memiliki nilai, tetapi realitas yang tidak terselami dan hanya dapat disandingkan dengan ketakterhinggaan. Jika dapat disandingkan dengan teori *big bang*, maka wakaf dapat diibaratkan dengan titik singularitas atau titik vakum sebagai awal dan akhir dari semesta jagad raya. Sebagaimana dalam proses ritual haji, *wukuf* adalah puncaknya yang tanpanya, keabsahan haji menjadi batal. Sama halnya dengan *itmi'nan* (berhenti dan tenang) dalam shalat agar dapat

---

<sup>1</sup>H. Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Cet ke 2; Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 25.

<sup>2</sup>H. Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Cet. 1; Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 6.

mencapai tujuan utamanya. Hal tersebut dapat diequivalenkan dengan teori psikologi Islam yang menyebutkan bahwa tingkat tertinggi capaian jiwa manusia adalah ketenangan (*mutmainnah*) yang berarti tanpa gerak. Capaian inilah yang menjadi prasyarat agar mendapat panggilan untuk dapat dimasukkan sebagai seorang hamba.<sup>3</sup>

Dalam kamus Arab–Melayu yang disusun oleh Muhammad Fadlullah dan B. Th. Brondgeest dinyatakan bahwa, wakaf menurut istilah berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah Swt.<sup>4</sup>

Berikut ini disajikan beberapa pengertian Wakaf dibuat oleh para ahli, yang pada dasarnya sama saja. Menurut Moh, Anwar yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu barang daripada dijualbelikan atau diberikan atau dipinjamkan oleh yang empunya guna dijadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu tertentu yang diperbolehkan oleh syara' serta tetap bentuknya dan boleh dipergunakan atau diambil hajatnya oleh orang yang ditentukan perorangan atau umum.

Kemudian Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi) memberikan pengertian wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebut *ariah* atau *commodate loan* untuk tujuan-tujuan amal saleh. Sementara itu pengikut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberikan pengertian wakaf sebagai penahanan pokok suatu benda di bawah hukum benda tuhan yang Mahakuasa, sehingga hak pemilikan dari wakif

---

<sup>3</sup>Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 2.

<sup>4</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 51.

berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang mahakuasa, untuk sesuatu tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluk-Nya.

Apabila harta tersebut adalah hak milik Allah, sementara Allah telah menyerahkan kekuasaan atas harta tersebut kepada manusia (nazhir), melalui izin darinya, maka perolehan seorang atas harta tersebut sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengembangkan manfaat dari harta tersebut, yang antara lain karena telah diberi mandat untuk mengelola. Sebab ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkannya. Sehingga dalam hal ini dia (nazhir) terikat dengan hukum-hukum *syara'*.<sup>5</sup>

Selanjutnya Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *De Religie van den Islam* memberikan batasan, yang dimaksud dengan wakaf adalah penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang seseorang atau yang bersifat keagamaan, untuk tujuan amal.

Sementara itu Naziroedin Rahmat dalam bukunya *Harta Wakaf* memberikan pengertian harta wakaf ialah suatu barang yang sementara asalnya (zatnya) tetap, selalu berbuah, yang dapat dipetik hasilnya dan yang empunya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang diperintahkan syariat.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dana atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

---

<sup>5</sup>Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Cet. 1; Jakarta: kencana, 2007), h. 3.

untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan wakaf adalah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Dalam pandangan umum harta tersebut adalah milik Allah, dan oleh sebab itu, persembahan itu adalah abadi dan tidak dapat dicabut kembali. Harta itu sendiri ditahan atau dikakukan (*immobilized*) dan tidaklah dapat dilakukan lagi pemindahan-pemindahan. Selanjutnya wakaf tersebut tidak dapat diakhiri, ia milik Allah dan haruslah diabadikan, sesuai dengan kecerdasan manusia untuk menjamin keabadian itu. Keabadian mana dijamin dengan suatu fiksi hukum yang menyatakan bahwa harta itu telah berpindah milik ke tuhan yang Mahakuasa. Karenanya harta yang dijadikan wakaf tersebut tidak habis karena dipakai, dengan arti biarpun faedah harta itu diambil, tubuh benda itu masih tetap ada.<sup>6</sup>

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga. Selain itu, dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan rumusan definisi wakaf sebagaimana pendapat rapat komisi fatwa MUI pada tanggal 11 mei 2002, bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 52-53.

<sup>7</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 107.

Wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.

Defenisi terbaru dari wakaf tunai menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang, pasal 1 angka (1). Wakaf uang dalam PMA ini diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa wakaf tunai adalah wakaf yang dikeluarkan oleh wakif berupa uang tunai untuk dimanfaatkan dan diserahkan kepada pihak pengelola tanpa mengurangi atau menghabiskan nilai wakaf tersebut.

Selintas wakaf tunai atau wakaf uang ini memang tampak seperti instrument keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infaq, sedekah (ZIS). Padahal ada perbedaan antara instrument-instrumen keuangan tersebut. Berbeda dengan wakaf tunai, ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah wakif yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu, instrumen wakaf tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.

## **B. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf Tunai**

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf tunai adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf tunai yaitu:

1. Orang yang berwakaf (wakif)
2. Ada harta yang diwakafkan (mauquf bih)
3. Ada tujuan harta wakaf itu diwakafkan (mauquf alaih)
4. Ada akad/ Pernyataan wakaf (sighat) atau ikrar

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 terdapat tambahan unsur atau rukun wakaf, yaitu

1. Ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari wakif sebagai pengelola wakaf (Nazhir)
2. Ada jangka waktu wakaf (wakaf tertentu).<sup>8</sup>

Rukun wakaf tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing. Adapun yang menjadi syarat umum sahnya wakaf uang adalah:

### **1. Syarat wakif**

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria, yaitu :

#### **a. Merdeka**

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian,

---

<sup>8</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 111-112.

Abu Zahrah mengatakan bahwa para fukaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau tabarru'. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan walaupun hanya sebagai tabarru' saja.

b. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c. Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa, hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan ihtihsan, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

Namun ada kalanya seseorang yang mewakafkan hartanya, tetapi wakaf tersebut tidak langsung terlaksana, dan pelaksanaannya dikaitkan dengan kerelaan orang lain. Ada beberapa wakaf yang berkaitan dengan masalah ini :

1. Orang yang mempunyai hutang, maka hukum wakafnya ada tiga macam :
  - a. Jika ia berada di bawah pengampuan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya, sedangkan hutangnya meliputi seluruh harta yang dimiliki, hukum wakafnya sah. Tetapi pelaksanaannya tergantung pada kerelaan para krediturnya, apabila mereka merelakannya, maka wakaf dapat terlaksana sebab para kreditur telah menggugurkan hak mereka untuk mencegah atau membatalkan wakaf si debitur, tetapi jika mereka tidak merelakannya, wakaf tidak dapat dilaksanakan. Apabila hutang si wakif tidak sampai meliputi seluruh harta yang dimiliki, maka wakafnya sah dan dapat terlaksana atas kelebihan harta setelah dikurangi sebagian untuk melunasi hutang, sebab perbuatan baiknya tidak merugikan para kreditur yang haknya tergantung pada kemampuan si wakif untuk melunasi piutang mereka.
  - b. Jika ia berada di bawah pengampuan karena hutang, dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya ketika sedang menderita sakit parah, maka hukum wakafnya seperti orang yang di bawah pengampuan karena hutang, yakni wakafnya sah tetapi pelaksanaannya tergantung pada kerelaan para kreditur. Apabila setelah si wakif meninggal para kreditur merelakannya, maka wakafnya dapat dilaksanakan, tetapi jika mereka tidak merelakan, maka wakafnya tidak bisa dilaksanakan. Dan para kreditur berhak menuntut pembatalan semua wakafnya jika hutang si wakif meliputi seluruh harta yang dimiliki, atau membatalkan sebagian wakaf sejumlah yang dapat digunakan



untuk melunasi hutang saja, apabila hutangnya tidak meliputi harta yang dimiliki.

Pada kedua kasus diatas terdapat persamaan, yaitu unsur ketergantungan hak para kreditur pada tanggungan dan harta si debitur secara bersama. Hanya saja dalam kasus pengampuan, terlaksananya wakaf tergantung pada ada atau tidaknya kerelaan para kreditur saat terjadinya wakaf. Sedangkan dalam kasus kedua, dimana si debitur tidak di bawah dalam pengampuan karena hutang dan mewakafkan hartanya ketika sedang sakit parah, tidak ada ketergantungan pelaksanaannya pada atau tidak adanya kerelaan para kreditur kecuali setelah si debitur meninggal.

- c. Jika dia tidak di bawah pengampuan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya ketika dalam keadaan sehat, maka wakafnya sah dan dapat dilaksanakan, baik hutangnya meliputi seluruh harta yang dimiliki atau hanya sebagian saja. Sebab dalam kasus ini, tidak ada hak si debitur, yang ada tergantung hak mereka pada tanggungannya saja. Dan kemungkinan bahwa setelah wakaf terjadi si debitur dapat melunasi semua hutangnya, sebab dia masih sehat dan bisa mencari harta lagi.
2. Apabila wakif mewakafkan hartanya ketika ketika sedang sakit parah (sakit yang mematikan). Jika ketika mewakafkan harta tersebut dia masih cakap untuk melakukan perbuatan baik (tabarru'), maka wakafnya sah dan dapat dilaksanakan selama dia masih hidup, sebab selama itu penyakitnya tidak bisa dihukumi sebagai penyakit kematian. Tetapi jika kemudian si wakif meninggal karena penyakit yang di derita tersebut, maka hukum wakafnya sebagai berikut :

- a. Jika dia meninggal sebagai debitur, maka hukum wakafnya seperti yang telah diuraikan dalam poin (a) di atas.
- b. Jika dia meninggal tidak sebagai debitur, maka hukum wakaf yang terjadi ketika dia sedang sakit seperti hukumnya wasiat. Yakni jika yang diberi wakaf bukan ahli warisnya dan harta yang diwakafkan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) hartanya, maka wakaf terlaksana hanya sebatas sepertiga hartanya saja, sedangkan selebihnya tergantung pada kerelaan ahli waris, sebab kelebihan dari sepertiga harta, tersebut adalah menjadi hak milik mereka.

Jika yang diberi wakaf adalah ahli warisnya, maka pelaksanaan wakafnya tergantung pada kerelaan ahli waris lainnya yang tidak menerima wakaf, baik wakafnya kurang dari sepertiga atau lebih dari harta yang ditinggalkan. Jika yang diberi wakaf sebagian ahli waris dan sebagian bukan ahli waris, maka pelaksanaan wakaf yang diberi kepada ahli waris tergantung pada kerelaan ahli waris lainnya, adapun yang kepada bukan ahli waris pelaksanaan wakafnya tidak tergantung pada kerelaan ahli waris selama harta yang diwakafkan tidak lebih dari sepertiga hartanya. Maksudnya ialah jika ahli waris (bukan Nazhir) merelakan, maka wakaf dapat dilaksanakan dan manfaatnya dapat dibagikan kepada semua *mauquf 'alaih* sesuai dengan syarat yang ada, hanya saja yang menjadi bagian ahli waris kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris (yang menjadi Nazhir dan yang bukan) sesuai dengan bagian masing-masing syara'.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), h. 19-23.

3. Wakaf harus dilakukan secara tunai
4. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan
5. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

*e. Sejarah wakaf Tunai*

Dalam kajian sejarah, wakaf merupakan lembaga keagamaan yang paling tua dalam Islam dan bahkan sudah dikenal semenjak masa rasul, walaupun pada saat itu belum menggunakan term tersebut. Selanjutnya para ulama berbeda pendapat mengenai siapa orang pertama yang melaksanakan praktik wakaf, sebagian mereka adalah ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali melakukan praktik wakaf, sedangkan ulama yang lain mengatakan Umar Bin Khattab. Perselisihan pendapat ini terkait dengan persoalan wakaf produktif yang dipraktikkan Nabi Muhammad berupa tujuh lokasi perkebunan pohon kurma yang sangat terkenal, yaitu al-a'raf, ash-shafiyah, ad-dalal, al-misyab, al-husna, dan masyarabah ummi Ibrahim dengan wakaf yang dipraktikkan Umar Bin khattab di Khaibar.

Para ahli hukum Islam, menyebutkan bahwa wakaf yang pertama adalah bangunan suci Ka'bah di Mekah. Bangunan suci tersebut dikenal sebagai rumah ibadah pertama yang dibangun oleh umat manusia. Sejarah mencatat, wakaf keagamaan pertama terjadi pada masa rasulullah Saw, ketika hijrah bersama kaum muhajirin ke Madinah, Rasulullah bersama kaum muslimin membangun Masjid Quba. Inilah wakaf keagamaan pertama yang terjadi dalam sejarah Islam. Enam bulan

setelah membangun Masjid Quba, di pusat kota Madinah juga dibangun Masjid Nabawi, yang juga dalam bentuk wakaf keagamaan.

Pada zaman Nabi Muhammad Saw, ada seseorang bernama Mukhairiq mendermakan (mewakafkan) tujuh bidang kebun buah-buahan miliknya yang ada di Madinah setelah dia meninggal kepada Nabi Saw, pada 626 M. Nabi Saw, mengambil alih kepemilikan tujuh bidang kebun tersebut dan menetapkan sebagai wakaf derma untuk diambil manfaatnya bagi fakir miskin. Praktik itu kemudian diikuti oleh para sahabat Nabi Saw, dan Khalifah bin Khattab. Tak lama setelah Nabi Saw wafat, khalifah Umar Bin Khattab memutuskan untuk membuat dokumen tertulis mengenai wakafnya di Khaibar. Dia mengundang beberapa sahabat untuk menyaksikan penulisan dokumen tersebut. Wakaf itu kemudian dikenal sebagai wakaf keluarga. Penyerahan tanah oleh Umar yang terletak di Khaibar untuk kepentingan umum kaum muslimin juga dianggap sebagai bentuk wakaf tertua yang berasal dari zaman Nabi saw.

Pada abad kedua Hijriah, umat Islam mulai mengenal wakaf tunai. Imam az-Zuhri merupakan salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi al-hadis yang berpendapat hukum bolehnya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Perkembangan wakaf tunai terjadi pada masa kepemimpinan Salahuddin al-Ayyubi, di Mesir, hasil dari wakaf tunai digunakan untuk membiayai pembangunan negara serta membangun masjid, sekolah dan rumah sakit. Pada masa Bani Umayyah, wakaf terus berkembang khususnya di Syam dan Mesir, serta dunia Islam lainnya. Di Mesir bahkan sudah ada

badan pengurus khusus tentang harta wakaf yang dipelopori oleh Hakim Tauban Ibnu Namir.<sup>10</sup>

Praktek wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktekkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktek sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktek masyarakat sebelum Islam. Sedangkan wakaf tunai mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubiah di Mesir.

Perbincangan tentang wakaf tunai mulai mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi seiring berkembangnya sistem perekonomian dan pembangunan yang memunculkan wakaf inovasi-inovasi baru. Wakaf tunai sebagai instrumen finansial (*financial instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial (*social finance and voluntary sector banking*) dipelopori oleh Prof. M.A. Mannan, pakar ekonomi asal Bangladesh. Wakaf tunai yang digagas oleh Mannan merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrumen finansial yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini berkisar pada *murabahah* untuk membiayai sektor perdagangan dan *mudharabah* atau *musyarakah* untuk membiayai investasi dibidang industri dan pertanian. Bank juga tidak mau menerima tanah atau aset lain yang merupakan harta wakaf yang dijadikan jaminan. Karena harta wakaf bukan hak milik, melainkan hak pakai terhadap manfaat harta itu.

---

<sup>10</sup>Naimah, “ Kedudukan Hukum Wakaf Tunai dalam Telaah Fiqh Muamalah Serta Implementasinya Dalam Hukum Positif Indonesia” *Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari* 15, no. 1 (Juni 2015): h. 85.

Munculnya gagasan wakaf tunai memang mengejutkan banyak kalangan, khususnya para ahli dan praktisi ekonomi Islam karena wakaf tunai berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya, bahwa wakaf itu berbentuk benda-benda tak bergerak. Wakaf tunai bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar. Diakomodirnya wakaf tunai dalam konsep wakaf sebagai hasil interpretasi radikal yang mengubah definisi atau pengertian mengenai wakaf. Tafsiran baru ini dimungkinkan karena berkembangnya teori-teori ekonomi.<sup>11</sup>

***f. Tujuan dan Manfaat Wakaf Tunai***

**1. Tujuan Wakaf tunai**

Wakaf tunai selain bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah Swt dan mendapat ridha-Nya, wakaf tunai juga memiliki tujuan untuk penggalan dari masyarakat yang bertujuan sosial, antara lain sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Menggalan tabungan sosial untuk kebaikan dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
- b. Meningkatkan investasi sosial.
- c. Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya atau berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya.

<sup>11</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2005), H. 1.

<sup>12</sup>Anisa Fitria Utami, Munawar Ismail “implementasi Pengelolaan Wakaf tunai (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah)”, *Laporan Hasil Penelitian* (Malang: Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya, 2014), hal. 4

Seperti halnya dengan zakat, wakaf merupakan ibadah Maliyah berbentuk shadaqoh jariyah yakni sedekah yang terus mengalir pahalanya untuk orang yang menyedekahkannya selama barang atau benda yang disedekahkan itu masih ada dan dimanfaatkan.

## 2. Manfaat Wakaf Tunai

Menurut Umer Chapra dalam bukunya, *The Tuture of Oconimics*, mengungkapkan bahwa sejumlah nilai dan institusi Islam dianggap dapat membantu menciptakan persaudaraan Islam yang ideal, persamaan social dan distribusi yang merata. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi yang tidak melihat lintas waktu, wakaf ternyata tidak hanya sekedar mentransformasikan tabungan masyarakat berkecukupan menjadi dana umat, namun juga dapat menjadi salah satu sarana meratakan pertumbuhan ekonomi suatu negara.<sup>13</sup>

Adapun manfaat wakaf tunai yang diutarakan M. Syafei Antonio ada empat, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- b. Melalui wakaf uang atau wakaf tunai aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- c. Dana wakaf tunai juga bisa membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam.
- d. Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara.

<sup>13</sup>Naimah, “ Kedudukan Hukum Wakaf Tunai dalam Telaah Fiqh Muamalah Serta Implementasinya Dalam Hukum Positif Indonesia, h.84.

<sup>14</sup>M. Syafii Antonio, *Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan*, (Jakarta: Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Bimas dan Haji DEPAG RI, 2004), H. 212.

### g. *Dasar Hukum Wakaf Tunai*

Sistem wakaf merupakan konsep yang tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam al-Qur'an. Kendatipun demikian, dalam beberapa ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik untuk kebaikan masyarakat, dipandang oleh para ahli hukum sebagai landasan perwakafan. Pemahaman masyarakat ialah tentang dasar hukum yang selama ini hanya dipahami sebagai benda yang tetap atau tidak bergerak. Para ahli fiqh menjelaskan beberapa ayat yang sifatnya umum. Adapun dasar hukum wakaf tunai, yaitu:

Diantara ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan wakaf ialah QS. li 'Imr n/3: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Di sini dikemukakan kapan dan bagaimana sehingga nafkah seseorang akan dapat bermanfaat. Yakni bahwa yang dinafkahkan hendaknya harta yang disukai, karena *kamu sekali-kali tidak meraih kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan* dengan cara yang baik dan tujuan serta motivasi yang *sebagian dari apa*, yakni *harta benda yang kamu sukai*. Jangan khawatir merugi atau menyesal dengan pemberianmu yang tulus, karena *apa saja yang kamu nafkahkan*, baik itu dari yang kamu sukai maupun yang tidak kamu sukai, *maka sesungguhnya tentang segala sesuatu menyangkut hal itu Allah Maha Mengetahui*, dan Dia yang akan memberi ganjaran untuk kamu baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>15</sup>

<sup>15</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an* (Cet. I, Tangerang: Lentera Hati, 2007), h. 151.



Ayat ini juga merupakan salah satu motivasi terhadap penyempurnaan ibadah kepada tuhan sehingga dikatakan-Nya bahwa apabila kamu belum menafkahkan sebahagian dari harta yang kamu cintai, maka nilai ibadahmu belum sempurna. Membelanjakan harta itu pada hakekatnya adalah merupakan realisasi dari suatu hal menyangkut perbuatan kebajikan, dimana kebajikan itu menjadi salah satu tujuan yang penting dari ajaran Islam, bahwa pada hakekatnya bakti kepada masyarakat serta menyantuni umat Islam ada dua tujuan yang dapat dicapai dengan wakaf agar memperoleh keridhaan Allah swt. dan memberikan pengayoman sosial.

Dalam kaitannya ayat tersebut dengan wakaf adalah janji Allah kepada hambanya bahwa seseorang yang ingin memperoleh kebajikan hendaklah menafkahkan sebahagian harta yang dicintainya, disini nafkah disamaartikan dengan wakaf, karena nafkah dan wakaf sama-sama diberikan kepada orang lain untuk diambil manfaatnya. harta yang diwakafkan haruslah yang berharga, bernilai dan bermanfaat, Islam sangat memperhatikan pemanfaatan atas sumber-sumber ekonomi sehingga pemilikan dalam Islam terletak pada pemilikan kemanfaatannya, dan bukan penguasaan secara mutlak.<sup>16</sup> Karena pada umumnya harta yang memiliki sifat tersebut dicintai oleh pemiliknya, agar dapat dimanfaatkan secara terus-menerus oleh masyarakat. Harta yang tidak bermanfaat tidak boleh diwakafkan, karena masyarakat tidak bisa mengambil manfaat dari benda tersebut.

---

<sup>16</sup>Hamsir, *Teori Dan Prospek Sistem Mudharabah pada Perbankan Syariah* (cet. I; Makassar: alauddin press, 2011), h. 100.

Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ  
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahnya:

perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap butir-seratus biji Allah melipatgandakan (ganjaran) bagia siapa yang dikehendaki dan Allah maha luas (Karunia-Nya) lagi maha mengetahui.

Ayat ini turun sebagaimana disebut-sebut dalam sekian riwayat, menyangkut kedermawanan Utsman Ibn ‘Affân dan Abdurrahmân Ibn ‘Auf ra. Yang datang membawa harta mereka untuk membiayai peperangan Tabuk. Bahwa ayat ini turun menyangkut mereka, bukanlah berarti bahwa ia bukan janji Ilahi terhadap setiap orang yang menafkahkan hartanya dengan tulus.

Ayat ini berpesan kepada yang mempunyai agar tidak merasa berat membantu, karena apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda.

*Perumpamaan keadaan yang sangat mengagumkan dari orang-orang yang menafkahkan harta mereka dengan tulus di jalan Allah, adalah serupa dengan keadaan yang sangat mengagumkan dari seorang petani yang menabur butir benih. Sebutir benih yang ditanamnya menumbuhkan tujuh butir, dan pada setiap butir, terdapat serratus biji.*

Dengan perumpamaan yang mengagumkan itu, sebagaimana yang dipahami dari kata ( ) *matsal*, ayat ini mendorong manusia untuk berinfak. Bukankah jika ia menanam sebutir di tanah, tidak lama kemudian ia akan mendapatkan benih tumbuh berkembang sehingga menjadi tumbuhan yang menumbuhkan buah yang sangat banyak? Kalau tanah yang di ciptakan Allah memberikan sebanyak itu, apakah

engkau, hai manusia, ragu menanamkan hartamu di tangan Allah? Apakah keyakinanmu kepada tanah, melebihi keyakinanmu kepada pencipta tanah?

Ayat ini menyebut angka tujuh. Angka tersebut tidak harus dipahami dalam arti angka yang di atas enam dan dibawah delapan, tetapi ia serupa dengan istilah seribu satu yang tidak berarti angka di bawah delapan 1002 dan di atas 1000. Angka ini dan itu berarti banyak. Bahkan pelipatgandaan itu tidak hanya tujuh ratus kali, tetapi lebih dari itu, karena *Allah* terus-menerus *melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki*. Jangan menduga, Allah tidak mampu memberi sebanyak mungkin. Bagaimana mungkin Dia tak mampu memberi sebanyak mungkin. Bagaimana mungkin dia tak mampu, bukankah *Allah maha Luas* anugerahnya-Nya. Jangan juga menduga, Dia tidak tahu siapa yang bernafkah dengan tulus di jalan yang diridhai-Nya. Yakinlah bahwa *Dia maha mengetahui*.

Wakaf tunai juga ditegaskan dalam hadist Rasulullah Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, Sesungguhnya rasulullah Saw, bersabda; Apabila anak adam (Manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara yaitu shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya. (HR. Muslim)<sup>17</sup>

Hadist diatas tidak menyebutkan wakaf, tetapi disini wakaf yang dimaksud adalah shadaqah jariah, shadaqah dapat dibedakan menjadi dua yaitu, sedekah yang wajib dan shadaqah yang sunah. Sedekah yang sunah pun dapat dibedakan dapat dibedakan menjadi dua pula, shadaqah yang pahalanya tidak senantiasa mengalir, dan sedekah yang senantiasa mengalir meskipun pihak yang menyedekahkan hartanya

<sup>17</sup> Mukhtar Lutfi, *Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 28.

telah meninggal dunia. Wakaf disebut shadaqah jariyah karena pahalanya terus mengalir, sepanjang harta yang diwakafkan oleh pewakif masih terus digunakan oleh masyarakat.



### BAB III

#### WAKAF TUNAI DI TINJAU DARI BERBAGAI ASPEK

##### A. *Wakaf Tunai Di Tinjau Dari Pandangan Ulama*

Hukum wakaf uang atau wakaf tunai telah menjadi perhatian para ahli hukum Islam. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam Al-Bukhari (wafat tahun 256 H) mengungkapkan bahwa Imam Az-Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat dinar dan dirham boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha dagang, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.<sup>1</sup>

Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-Urfi*. Mazhab Hanafi merupakan aliran fiqh yang merupakan hasil ijtihad Imam Abu Hanifah, mazhab ini banyak menggunakan *ra'yu* atau hasil fikiran. Ulama Hanafiyah, mensyaratkan benda yang diwakafkan berupa benda-benda yang dapat dipertahankan dalam waktu yang lama, baik benda yang bergerak, maupun benda yang tidak bergerak. Benda yang bergerak dipastikan nilainya mempunyai sifat yang kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Cara melakukan wakaf tunai menurut mazhab Hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Hukum kehalalan pendapatan dalam pembiayaan *mudharabah* adalah bersifat fardu 'ain,<sup>2</sup> Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Ibnu Abidin menjelaskan bahwa uang dirham dan uang dinar

---

<sup>1</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), h. 1.

<sup>2</sup>Saiful Muchlis, *Akuntansi Perbankan Syari'a*, (cet. I; Makassar: Alauddin press, 2011), h. 4.

dapat diwakafkan dengan alasan sudah berlaku di masyarakat. Ia menunjukkan contoh di negeri Romawi dan negeri –negeri lainnya berlaku wakaf uang.

Imam Malik dan Syi'ah Imamiyah, seperti yang dikemukakan Abu Zahrah, membolehkan wakaf benda-benda bergerak sejalan dengan pemikiran mereka yang membolehkan wakaf untuk jangka waktu yang terbatas, seperti satu tahun, dua tahun atau lima tahun. Dengan membolehkan untuk jangka waktu terbatas ini, maka persyaratan wakaf tidak mesti berupa benda-benda yang tahan lama atau yang tidak berubah, tetapi semua benda termasuk uang dan makanan boleh diwakafkan.<sup>3</sup>

Yang berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh adalah mazhab Syafi'I, menurut Al-Bakri, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.

Mengenai wakaf uang ulama Syafi'iyah sebagian dari mereka membolehkan dan sebagian lagi tidak membolehkan. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa uang dapat dijadikan perhiasan untuk disewakan sehingga memperoleh keuntungan yang dapat dibagikan kepada fakir miskin. Ulama yang tidak membolehkan beralasan bahwa penggunaan yang demikian bukanlah fungsi uang yang sebenarnya, fungsi uang yang sebenarnya adalah alat tukar menukar.

Ulama Hanabilah memberi batasan benda-benda yang boleh diwakafkan adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, serta tidak punah wujudnya ketika digunakan. Dengan batasan ini, benda-benda yang dapat diwakafkan meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak.

---

<sup>3</sup>Anisa Fitria Utami, Munawar Ismail “implementasi Pengelolaan Wakaf tunai (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah)”, *Laporan Hasil Penelitian* (Malang: Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya, 2014), hal. 4

Persoalan perbedaan pendapat tentang wakaf tunai di kalangan ulama, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya berkisar pada wujud uang, karena uang banyak beredar dimasyarakat sementara fungsinya dilihat dari satu sisi hanya sebagai alat tukar menukar dan dilihat dari sisi lain sebagai standar nilai. Apabila uang difungsikan sebagai alat tukar menukar yang musnah ketika digunakan, tentu tidak memenuhi persyaratan wakaf, tetapi apabila difungsikan sebagai standar nilai yang relatif dapat dipertahankan, tentu memenuhi persyaratan wakaf, karena uang dalam fungsinya yang terakhir ini terbukti dapat disimpan, dipinjamkan dan dijual belikan.<sup>4</sup>

Namun kalau melihat perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang, sangat mungkin untuk melakukan wakaf tunai. Misalnya uang diwakafkan itu dijadikan modal usaha seperti yang dilakukan oleh mazhab Hanafi. Atau diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan yang *bonafide* atau didepositokan di perbankan syariah, dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf tunai yang di investasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu lama.

### **B. Wakaf Tunai Menurut Fatwa MUI**

Menanggapi berbagai wacana tentang wakaf tunai dan surat dari Direktorat pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Bernomor: Dt. 1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon

---

<sup>4</sup>H. Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat: Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor* (Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), h. 202.

dengan mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang, yang ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin sebagai ketua komisi fatwa dan Drs. Hasanudin, M. Ag. Sebagai sekretaris komisi fatwa. Fatwa MUI tentang wakaf merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf, lebih-lebih uang merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Majelis ulama Indonesia (MUI) membolehkan wakaf tunai atau wakaf uang melalui fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002. Isi fatwa MUI tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf uang (cash wakaf/ waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Setelah keluarnya fatwa MUI tersebut, pengembangan wakaf semakin mendapat legitimasi, paling tidak pada tataran landasan hukum keagamaan. Meskipun sebagian kalangan ulama fiqh tidak sependapat dengan bolehnya wakaf uang, tapi dengan adanya fatwa MUI tersebut bisa dijadikan sandaran yang cukup kuat bagi ide pemberdayaan wakaf tunai.



### **C. Wakaf Tunai Menurut Undang-Undang NO. 41 Tahun 2004**

Lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan momentum yang sangat strategis dalam upaya pemberdayaan wakaf secara produktif. Pengelolaan wakaf secara produktif di negara-negara muslim menjadi bukti nyata bahwa wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan sarana ibadah.

Wakaf tunai bagi umat Islam Indonesia memang masih relatif baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memberikan fatwanya pada pertengahan Mei 2002. Sedangkan Undang-undang tentang wakaf yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004 disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.<sup>5</sup>

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa:

1. Harta benda wakaf terdiri dari
  - a. Benda tidak bergerak; dan
  - b. Benda bergerak
2. Benda tidak bergerak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
  - b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a
  - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
  - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi
  - a. Uang
  - b. Logam mulia

---

<sup>5</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI: 2007), h. 8.

- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa, dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Secara khusus wakaf uang dapat dilihat dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 28 sampai dengan pasal 31 yaitu:

**Pasal 28**

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

**Pasal 29**

- (1) wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

**Pasal 30**

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

**Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29 dan pasal 30 diatur dengan peraturan pemerintah.

Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 16 ayat (3) pada UU di atas, salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf tunai adalah model dana abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar, diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjamin Syariah. Keamanan investasi ini paling tidak mencakup dua aspek. *Aspek pertama*, yaitu keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan). *Aspek kedua*, yaitu investasi dana abadi tersebut harus produktif, yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan (*incoming generating allocation*) karena

dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan organisasi akan dilakukan dan sekaligus menjadi sumber utama untuk pembiayaan.

Mengacu pada model dana abadi tersebut, konsep wakaf tunai dapat diberlakukan dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan. Penyesuaian harus dilakukan karena adanya persoalan yang melekat dalam model wakaf tunai, yaitu *problem of perpetuity*, persoalan keabadian selamanya. Salah satu upaya preventifnya adalah dengan menegaskan tujuan wakaf tunai itu secara jelas. Disamping itu juga langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut harus dinyatakan secara jelas dan mudah dipahami, sementara itu instrumen yang akan digunakan dalam mencapai tujuan wakaf tersebut juga tidak akan kalah pentingnya, baik dalam bentuk maupun nilainya.<sup>6</sup>

Model dana abadi tersebut sangat layak dijadikan model untuk pengembangan wakaf tunai. Beberapa alasan dapat dikemukakan antara lain:

1. Dapat membantu menjaga keutuhan aset tunai dari wakaf, sehingga dapat mengurangi *perpetuitas* yang melekat pada wakaf tunai.
2. Dapat menjadi sumber pendanaan (*source of financing*) pada unit-unit usaha yang bersifat komersial maupun sosial, sehingga dapat mendorong aktifitas usaha secara lebih luas. Secara khusus, ketersediaan dana dari sumber ini dapat mengisi ruang kosong yang terjangkau oleh sistem pembiayaan perbankan yang ada.
3. Cakupan target wakaf menjadi lebih luas, terutama dari aspek mobilisasi maupun aspek alokasi dana wakaf.

---

<sup>6</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, h. 9-10.

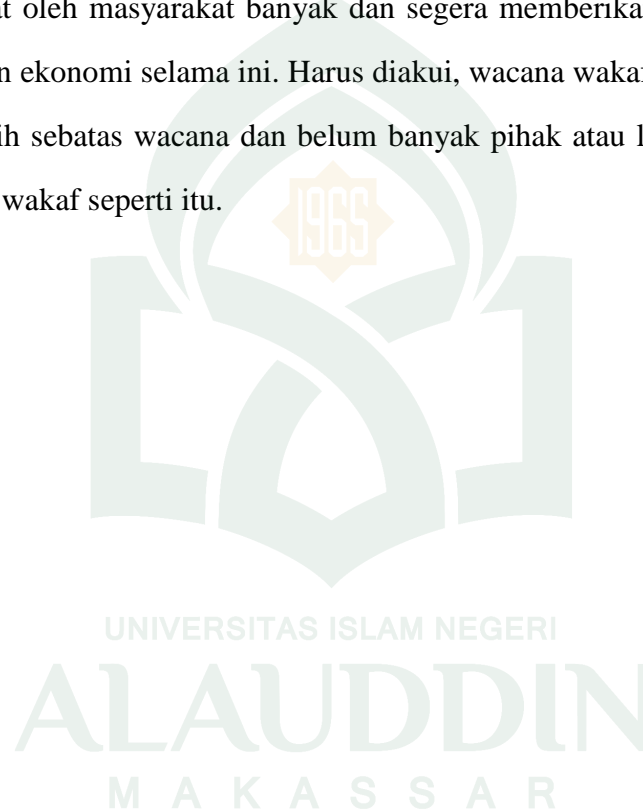
Dalam perundang-undangan diatas tentang wakaf tunai menjelaskan, bahwa wakaf benda tidak tetap antara lain berupa uang, dilakukan oleh wakif melalui lembaga keuangan syariah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri. Wakaf tunai dilaksanakan oleh wakif secara tertulis kepada lembaga keuangan syariah (LKS), kemudian oleh LKS menerbitkan sertifikat wakaf tunai, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan oleh LKS disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Selanjutnya, pasal 30 memberikan penjelasan, bahwa lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang tersebut kepada menteri selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Secara jelas peraturan perundang-undangan diatas memberikan kepastian hukum bahwa wakaf tunai diakui keberadaannya dalam hukum positif di Indonesia. Di samping itu, dalam undang-undang wakaf juga diperintahkan pembentukan badan wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, badan ini merupakan lembaga yang independen, sedangkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dilakukan oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri serta diumumkan kepada masyarakat luas.

Berdasarkan hasil studi pengelolaan wakaf secara empiris di lapangan pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, ternyata eksistensi regulasi tersebut tidak berpengaruh secara signifikan, bahkan UU perwakafan tersebut belum tersosialisasi secara menyeluruh khususnya kepada umat Islam, termasuk kepada para nazhir, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Faktor penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi regulasi undang-

undang perwakafan kepada masyarakat Islam. Padahal regulasi undang-undang perwakafan sangat penting untuk dipahami oleh seluruh masyarakat Islam, terutama menyangkut paradigma baru tentang wakaf benda bergerak atau wakaf tunai.

Sebagai sebuah upaya mensosialisasikan wakaf tunai untuk kesejahteraan sosial, maka harus disosialisasikan secara intensif agar wakaf tunai dapat diterima secara lebih cepat oleh masyarakat banyak dan segera memberikan jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi selama ini. Harus diakui, wacana wakaf tunai sampai saat ini memang masih sebatas wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf seperti itu.



## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI NEGARA INDONESIA, MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT ISLAM**

#### ***A. Pengelolaan wakaf tunai di negara Indonesia***

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Di Indonesia, agama Islam dianut oleh 85%,<sup>1</sup> penduduknya sehingga menjadikan kedudukan hukum Islam amat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkahlaku para pemeluknya, bahkan menjadi penentu utama pandangan hidupnya, maka hukum Islam telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran masyarakatnya mengenai hukum dan keadilan. Seiring dengan kemajuan zaman praktik hukum Islam semakin berkembang, meningkat dan meluas keberbagai sektor hukum, tidak hanya disektor hukum kekeluargaan seperti perkawinan dan kewarisan, tetapi juga kesektor hukum lainnya seperti hukum hibah, wasiat, shadaqah, zakat dan bahkan sampai ke sektor hukum perbankan. Termasuk juga sektor hukum wakaf. Oleh karena itu jumlah penduduk muslim yang besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi menciptakan keadilan sosial dengan tujuan mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda Indonesia.

Kenyataan rakyat Indonesia yang 85% muslim merupakan potensi besar sebagai calon wakif. Karena bagi masyarakat muslim beramal dengan harta merupakan kebutuhan jiwa. Potensi penghimpun dana dari wakaf uang di Indonesia

---

<sup>1</sup>“Republika.co.id”, Persentase Umat Islam di Indonesia. [http :googleweblight.co.id&ts147218](http://googleweblight.co.id&ts147218) (26 Agustus 2016)

lumayan besar. Dengan hitungan paling moderat, dalam satu tahun bisa di himpun dana sebanyak 3 triliun.<sup>2</sup>

Pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia sebetulnya sudah mulai ada yang melakukan dari berbagai lembaga filantropi yang ada di Indonesia. Misalnya, Baitul Mal Muamalat, meluncurkan Wakaf Tunai Muamalat (waqtumu), Dompot Dhuafa Republika Meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) juga meluncurkan wakaf uang. Hasil investasi wakaf uang dapat disalurkan untuk membantu biaya operasional lembaga-lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga sosial.<sup>3</sup>berikut ini adalah dua lembaga pengelolaan wakaf tunai yang terkenal di Indonesia.

#### **1. Tabung wakaf Indonesia(TWI)**

TWI merupakan lembaga Nazhir wakaf yang didirikan oleh Dompot Dhu'afa Republika yang berdiri pada tanggal 14 Juli 2005. Aktifitas TWI berkisar pada sosialisasi, edukasi dan advokasi wakaf kepada masyarakat sekaligus sebagai lembaga penampung dan pengelola harta wakaf. Untuk membiayai operasional wakaf, TWI menyisihkan 5-10 % hasil untuk operasional nazhir.

Visi dan misi TWI adalah menjadi lembaga Nazhir wakaf berorientasi global yang mampu menjadikan wakaf sebagai salah satu pilar kebangkitan ekonomi umat yang berbasiskan pada sistem ekonomi keadilan.

TWI merupakan nazhir wakaf terdepan di Indonesia. ia menerima wakaf uang dari masyarakat. Wakaf uang ditujukan untuk kalangan ekonomi menengah keatas dengan nilai minimal Rp. 1.000.000. wakif dapat menentukan alokasi dana wakaf

---

<sup>2</sup>Yusna Zaidah, "Wakaf Tunai sebagai Alternatif Pemberdayaan ekonomi Ummat di Indonesia", *Laporan Hasil Penelitian* (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2011), h. 7.

<sup>3</sup>Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia", *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan* 3, no. 1 (Mei 2012): h. 10.

uang, misalnya untuk pendidikan dan kesehatan. Dengan dana tersebut, TWI melakukan investasi dengan menggandeng Batasa Capital, TWI bertindak sebagai nazhir, sedangkan Batasa Capital bertindak sebagai manajer investasi dari Reksa Dana Domper Dhua'afa Batasa Syariah.

TWI juga menerima wakaf saham seperti saham PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI). Deviden yang diperoleh dari saham itu digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Deviden tidak boleh digunakan untuk investasi kembali. Apabila ingin melakukan investasi atau pembelian saham maka harus mencari wakif baru. Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan investasi, nazhir wakaf TWI menganalisa pihak yang akan diajak untuk mengola investasi.

Dalam melaksanakan kewajiban selaku nazhir, TWI melakukan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf yang dihimpunnya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pengelolaan aset wakaf di TWI dilakukan berdasarkan dua pendekatan, yaitu pendekatan produktif dan pendekatan non produktif.

Pendekatan produktif yaitu pengelolaan harta wakaf untuk hal-hal yang sifatnya produktif dan menghasilkan keuntungan. Keuntungan itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak dengan tetap mempertahankan nilai pokok dari harta yang bersangkutan. Dari hasil investasi tersebut, keuntungan dapat digunakan untuk program non produktif. Laporrannya akan dimonitor oleh donator melalui majalah TWI yang terbit secara berkala.

Penerimaan wakaf TWI mengalami pasang surut, TWI bisa mengumpulkan uang rata-rata 2 miliar pertahun. Dana tersebut diperoleh dari masyarakat secara langsung kemudian diinvestasikan dan hasilnya disalurkan kepada objek yang sudah



disiapkan oleh TWI. Namun TWI juga masih melayani wakaf langsung dalam bentuk uang. Misalnya, seseorang ingin membantu pengembangan rumah muallaf, maka dana yang disetor akan segera digunakan untuk peruntukan itu.

TWI memberikan sertifikat kepada wakif yang telah berwakaf minimal 1 juta rupiah. Sertifikat wakaf merupakan bukti bagi wakif bahwa ia telah berwakaf. Dalam mengola wakaf, TWI menggunakan pola pengelolaan *asset management*, yang memperlakukan wakaf sebagai aset yang menghasilkan surplus.

## **2. Baitul Mal Muamalat (BMM)**

BMM kepanjangan dari Baitul Mal Muamalat. BMM adalah sebuah lembaga dibawah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mengola perbankan sector volunter. Dalam kaitannya dengan wakaf uang BMM bukanlah bank. Ia adalah nazhir wakaf. Sementara BMI adalah salah satu LKS-PWU di Indonesia. BMI berdiri berkat upaya MUI dan ICMI pada tahun 1992. BMI menjadi pelopor LKS di Indonesia yang kemudian disusul oleh bank syariah lainnya. Sekarang hampir semua bank konvensional memiliki bank syariah. BMI merupakan lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia.

BMM memiliki beberapa program yang terkait dengan sektor volunteer. Program wakaf uang diwadahi dalam program yang diberi nama Waqtumu (Wakaf Tunai Muamalat) dan Syar'I Peduli.

Waqtumu merupakan program penggalangan dana masyarakat melalui wakaf uang yang bisa dibayarkan diseluruh kantor dan perwakilan BMI. Waqtumu memiliki dua manfaat, pertama hasil pengelolaannya dapat terdistribusi dengan tepat kepada yang berhak; kedua memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada peserta sebagai amaliah yang terus mengalir dunia dan akhirat.

Sementara syar'i peduli merupakan produk syar'i yang dikemas untuk model wakaf waktu terbatas. Misalnya ada seorang nasabah yang mempunyai tabungan syar'i, lalu ia blokir dananya dan keuntungannya ia gunakan untuk aktivitas sosial. Syar'i peduli merupakan tabungan syar'i Bank muamalat yang nominalnya ditahan oleh bank untuk jangka waktu tertentu. Tabungan syar'i peduli dapat dikatakan sebagai wakaf berjangka yang bagi hasilnya hasilnya masuk rekening infaq BMM. Karena wakaf berjangka, maka dananya bergerak keluar dan masuk sesuai keinginan wakif.

Waqtummu diluncurkan pada tahun 2002. Pada tahun pertama waqtumu mencatat telah memiliki peserta 34 wakif total dana 200 juta, investasi Deposito BPRS, hasil investasi 6 juta penyaluran dalam bidang pemberdayaan pendidikan, kesehatan dan ekonomi, program selling tradisional. Waqtumu memiliki tujuan sebagai berikut: pertama, meningkatkan menghimpun dana sosial masyarakat, kedua, menjamin ketersediaan dana yang besar untuk kepentingan *sustainability* program pemberdayaan, ketiga mendidik masyarakat agar mau menggunakan produk bank syari'ah.

Adapun ketentuan terkait dengan Waqtumu adalah sebagai:

- a. Wakif menentukan jangka waktu terbatas atau jangka waktu tidak terbatas dan penerima manfaat dana wakaf untuk pembinaan ekonomi, pendidikan atau kesehatan.
- b. Wakif yang mewakafkan dana sebesar Rp. 1M dapat menentukan penerima manfaat investasi dana wakaf.
- c. Wakif yang mewakafkan dana Rp. 100 juta dapat menunjuk keluarganya sebagai penerima manfaat investasi wakaf.

- d. Wakif adalah perorangan atau institusi.
- e. Pelaksana administrasi Dana wakaf adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- f. Manager pendayagunaan dana wakaf (nazhir) adalah Baitul Mal Muamalat (BMM)
- g. Waktu pengelolaan wakaf tunai terbatas minimal 3 tahun
- h. Jenis investasi dana wakaf ditentukan oleh nazhir dengan pertimbangan keamanan dan keuntungan serta kemanfaatan bagi kemaslahatan umat
- i. Dana waqtumu di kembangkan melalui lembaga-lembaga keuangan syariah sehingga mendapatkan bagi hasil
- j. Wakif mendapatkan sertifikat dan pelaporan pendayagunaan.

#### ***B. Pengelolaan Wakaf Tunai di Malaysia***

Sebagai sebuah negara Islam, Malaysia memiliki harta wakaf yang cukup banyak dan tersebar luas di seluruh penjuru negeri. Di Malaysia, harta wakaf selain digunakan untuk kepentingan peribadatan, juga digunakan untuk kepentingan pendidikan. Bahkan ada juga yang digunakan untuk kepentingan ekonomi, seperti untuk kepentingan apartemen, pertokoan, stasiun pengisian bahan bakar/SPBU, kebun kelapa, dan sebagainya.

Di Malaysia, wakaf tunai sudah mendapat perhatian Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) sudah mulai membangun system wakaf tunai dan saham wakaf. Pewakaf memberikan Uang kepada MAIN untuk dimasukkan kedalam tabung wakaf. Uang ini digunakan untuk aktifitas sosial, termasuk untuk investasi.

Wakaf saham dipergunakan untuk membiayai investasi wakaf. Seseorang individu atau sebuah organisasi membeli sejumlah saham yang ditawarkan oleh MAIN dengan keinginan mewakafkannya. Segala keuntungan yang lahir dari saham ini kekal dalam bentuk wakaf dan tidak diberikan kepada pembeli saham tersebut. Diantara negara bagiannya yang melaksanakan sistem saham wakaf ini ialah Johor, Pulau Pinang, Melaka dan Kedah.

Johor Corporation Berhard (JCorp), sebuah lembaga di bawah kerajaan negeri Johor di Malaysia menggunakan sistem saham ini dengan memperkenalkan satu sistem yang lebih inovatif, yang dinamai wakaf korporat. JCorp tidak menjual saham kepada individu atau organisasi seperti yang dilakukan dalam saham wakaf biasa. Sebaliknya JCorp sendiri yang mewakafkan saham-sahamnya. Misalnya pada 3 Agustus 2006, JCorp melalui tiga anak perusahaannya telah mewakafkan saham miliknya dengan nilai aset sebesar RM 200 juta. JCorp juga mewakafkan saham 75% dalam syarikat Tiram Trevel yang menguruskan paket umrah dan haji.

Selain dari wakaf korporat, JCorp juga menggunakan uang tunai sebagai benda bergerak untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka yang memerlukan, tidak dibedakan orang Islam dan non-Islam. JCorp merealisasikan usaha ini dengan mendirikan Dana klinik wakaf An-Nur untuk tujuan pembangunan rumah sakit dan klinik wakaf An-Nur, di bawah pengelolaan Wakaf Annur. Sampai tahun 2007, Dana klinik ini telah berhasil mempunyai lima rumah sakit dan klinik, yaitu klinik Wakaf An-Nur kotaraya di johor Bahru, Hospital wakaf An-Nur di Pasir Gudang Johor, klinik wakaf An-Nur Masjid Jamek Sultan Ismail di Batu Pahat Johor, Klinik Wakaf An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) Seremban, klinik Wakaf An-Nur Sungai Buloh Selangor.

Di Malaysia, disamping wakaf tunai yang dikelola oleh Majlis Agama Islam Negeri lahir pula institusi amanah saham wakaf. Amanah saham wakaf ini dioperasikan melalui bank. Mereka menawarkan saham ini kepada masyarakat dengan harga tertentu. Masyarakat yang membeli saham ini tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dan amal uang yang digunakan untuk membeli saham tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pengelola tanpa dapat mereka minta kembali. Kepentingan akan dikelola pemerintah untuk kepentingan umum. Tujuan utama dari uang yang dikumpulkan ialah membangun sarana-sarana yang bisa mendatangkan keuntungan pada tanah-tanah wakaf yang sudah tersedia, membeli sarana baru yang akan dijadikan harta wakaf, menginvestasikan pada sektor yang aman agar tidak hilangnya nilai nominal harta wakaf.<sup>4</sup>

### ***C. Pengelolaan Wakaf Tunai di Brunei Darussalam***

Di negara Brunei Darussalam segala urusan mengenai mengenai wakaf dikendalikan dan dikelola oleh Majlis Ugama Islam yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam Undang-Undang Negara Brunei Darussalam yaitu akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah hakim penggal 77 dalam bab 100. Akta tersebut mengatur bahwa Majlis hendaklah menjadi pemegang amanah tunggal bagi semua wakaf, termasuk wakaf bergerak dan benda tidak bergerak. Dalam hal wakaf tunai di negara Brunei Darussalam yang mengurus dan bertanggungjawab yaitu Baitul Mal dan Wakaf.

---

<sup>4</sup>Nilna Fauza, "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh dan Malaysia", *Universum* 9, no. 2 (Juli 2015): h. 168-169.

Di Brunei Darussalam wakaf tunai merupakan sumbangan yang paling populer. Sementara aset yang lain kurang mendapat perhatian disebabkan berbagai hal seperti nilai tanah yang semakin tinggi, meskipun wakaf tunai mendapat tempat di kalangan pewakif di negara ini, namun sebenarnya uang tunai yang disumbangkan khusus bagi tujuan tertentu yaitu pembinaan dan perluasan masjid, sekolah agama, perbaikan perkuburan dan kepentingan umum. Untuk memastikan uang tunai yang diwakafkan tersebut aman dari segi penyimpanannya dan teratur dari segi penagihan dan penyalurannya kepada pihak-pihak yang sepatutnya, maka Majlis agama Islam telah membentuk pengelolaan wakaf tunai di Brunei Darussalam pada tahun 2010 yang diberi nama Tabung Amanah Islam Brunei.

Untuk perwakafan uang tunai yang diserahkan ke Majlis Agama Islam harus melalui proses tertentu, bagi orang yang berniat untuk berwakaf tunai dianjurkan untuk datang ke bagian wakaf dan Baitul Mal di gedung Majlis Agama Islam. Kemudian pihak Malis Agama Islam memberi penjelasan yang lebih lanjut, setelah itu pewakaf diberi sertifikat wakaf tunai Majlis Agama Islam. Wakaf uang yang diterima oleh disimpan di bank syariah dalam rekening wakaf uang Majlis Agama Islam pada hari yang sama, laporan keuangan wakaf tunai di keluarkan setiap 3 bulan sekali, setiap wakif wakaf tunai akan diberikan laporan tentang perkembangan uang wakaf mereka setiap 6 bulan sekali.

Wakaf tunai disini tidak disalurkan dalam kegiatan-kegiatan perniagaan, akibatnya, dana wakaf tunai tidak dapat dikembangkan dan manfaatnya untuk kepentingan umum terbatas karena tidak ada aliran dana.

**Analisis:**

Pengelolaan wakaf tunai ditiga negara tersebut diatas jelas berbeda-beda. Di Negara Indonesia pengelolaannya kurang memadai disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya lembaga yang mengatur tentang wakaf yaitu Tabung Wakaf Indonesia (TWI). Pengelolaan wakaf tunai di Negara Malaysia sudah terbukti cukup bagus, ini terbukti dengan perkembangan pembangunan wakaf di Negara Malaysia dalam segala aspek seperti aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Sedangkan di Negara Brunei Darussalam bentuk pengelolaannya umumnya digunakan untuk sarana ibadah untuk umat muslim yang ada di Negara Brunei Darussalam.

Ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai lebih berkembang di Negara Malaysia, karena Negara tersebut lebih melebarkan sayap wakaf tunai kearah yang lebih baik seperti membentuk wakaf tunai. Manfaatnya terbesar yang dirasakan umat muslim di Negara tersebut adalah meningkatkan aspek sosio-ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

1. Wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang, pasal 1 angka (1). Wakaf uang dalam PMA ini diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf tunai adalah wakaf yang dikeluarkan oleh wakif berupa uang tunai untuk dimanfaatkan dan diserahkan kepada pihak pengelola tanpa mengurangi atau menghabiskan nilai wakaf tersebut.
2. Menurut Ulama Fikih bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya berkisar pada wujud uang, karena uang banyak beredar dimasyarakat sementara fungsinya dilihat dari satu sisi hanya sebagai alat tukar menukar dan dilihat dari sisi lain sebagai standar nilai. Sedangkan menurut Fatwa MUI wakaf tunai merupakan wakaf yang dilakukan seseorang atau lembaga ataupun badan hukum dalam bentuk uang. Wakaf uang hukumnya boleh, dimana nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 16 ayat 3 bagian (a) dijelaskan bahwa benda bergerak yang bisa



diwakafkan adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi (a) uang.

3. Manfaat wakaf tunai dalam mensejahterakan umat Islam di Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam adalah dalam aspek sosio-ekonomi, aspek kesehatan seperti pembangunan klinik dan rumah sakit, dan aspek pendidikan.

#### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan data-data yang telah didapatkan maka penulis memberikan implikasi sebagai berikut:

1. Bagi seluruh umat Islam agar dapat memanfaatkan wakaf tunai secara optimal, karena wakaf tunai mempunyai potensi untuk mensejahterakan umat terkhusus umat muslim.
2. Bagi lembaga-lembaga pengelola wakaf tunai agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar sistem pengelolaan wakaf tunai dapat berjalan dengan baik.
3. Khususnya di Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam agar meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf tunai di Negara masing-masing, agar wakaf tunai dapat terealisasi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abd Kadir. *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data*, Makalah yang disajikan pada Pelatihan Penelitian di UIN Alauddin, Makassar: t.p., 2012.
- Al-Alabij, H. Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Cet II; Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Bakker, Anton. *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia" , *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan* 3, no. 1 (Mei 2012).
- Departemen, Agama RI. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Departemen, Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: 2008.
- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* . Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* . Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006.
- , *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- , *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* . Jakarta: Kementerian Agama RI, 2005.
- , *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* . Jakarta: Kementerian Agama RI, 2005.
- , *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.

- ....., *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- ....., *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- Halim, H. Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. I; Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Hamsir. *Teori Dan Prospek Sistem Mudharabah pada Perbankan Syariah*. Cet. I; Makassar: alauddin press, 2011.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Negaraberkembang> (1 Juni 2016).
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Cet. I; Jakarta: kencana, 2007.
- Kementrian, Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: 2012.
- Lutfi, Mukhtar. *Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- , *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- ..... *Manajemen Wakaf Upaya Progresif dan Inovatif Bagi Kesejahteraan Umat*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- M. Syafii Antonio, *Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan*, Jakarta: Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Bimas dan Haji DEPAG RI, 2004.
- Maman, U. *Metode Penelitian Agama: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muchlis, Saiful. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. cet. I; Makassar: Alauddin press, 2011.
- Muin, Rahmawati. *Lembaga keuangan Syariah Bank dan Non Bank* Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Muzarie, H Muhlisin. *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- Naimah, “ Kedudukan Hukum Wakaf Tunai dalam Telaah Fiqh Muamalah Serta Implementasinya Dalam Hukum Positif Indonesia” *Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari* 15, no. 1 (Juni 2015):
- Nilna Fauza, “Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh dan Malaysia”, *Universum* 9, no. 2 (Juli 2015).
- Shihab M. Quraish. *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*. Cet. I, Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta. 2006.

- Usman, Rachmadi, *Hukum perwakafan di Indonesia* Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Utami, Anisa Fitria. Munawar Ismail “implementasi Pengelolaan Wakaf tunai (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah)”, *Laporan Hasil Penelitian*. Malang: Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya, 2014.
- Yusna, Zaidah, “Wakaf Tunai sebagai Alternatif Pemberdayaan ekonomi Ummat di Indonesia”, *Laporan Hasil Penelitian*. Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2011.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama **RAHMAWATI**, Lahir di Boronginru, Tanggal 07 Agustus 1995, tempat tinggalnya di Boroninru, Desa Parang Baddo, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Penulis adalah anak Pertama dari dua bersaudara lahir dari pasangan **JUFRI** dan **MAWATI**. Penulis menempuh jenjang pendidikan dimulai dari pendidikan SDI Parang Baddo (2000-2006), kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Polongbangkeng Utara (2006-2009). Setelah itu penulis lanjut di SMA Negeri 1 Bontonombo (2009-2012), kemudian berlabuh di kampus peradaban dan lulus pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2012-2016).

